




Peran Perempuan dalam Masyarakat terhadap Penempatan Anggota Legislatif di Komisi DPR RI Periode 2019-2024

Anggita Dita Sari¹, Arvi Octaviana², Devina Cahya Kamila³, Nian Puspita Permatasari⁴,
Tasya Fatah Putri Irawan⁵, Kuswan Hadji⁶
Universitas Tidar

| Article Info | ABSTRACT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Keywords: Women's participation gender gap legislative members Indonesian democracy</p> | <p>Indonesia as a democratic country upholds equal rights for all citizens to participate in politics including women. However, women still face discrimination in accessing strategic positions in state institutions especially in the legislature. Even though there has been an increase in women's representation in the Indonesian House of Representatives (DPR) in the 2019-2024 period, challenges remain especially in their placement in commissions which are important policy-making arenas. This research examines the distribution of women's roles in DPR commissions, the impact of this representation on policy, and how social factors such as class, ethnicity and education influence their opportunities in the legislative body. This study aims to provide insight into the contribution of women in policy making and gender dynamics in parliament which is expected to support the development of more inclusive policies and a gender perspective in Indonesia.</p> |
| <p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p>  | <p>Corresponding Author: Nian Puspita Permatasari Universitas Tidar Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116 nian.puspita.permatasari@students.untidar.ac.id</p> |

PENDAHULUAN

Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara Demokrasi yang salah satunya adalah Negara Indonesia. Setiap masyarakat memiliki pemerintahan dan hukum yang sama. Pemerintah menjamin hak politik yang setara bagi semua orang, termasuk hak untuk berpartisipasi dan menduduki posisi di lembaga negara. Lembaga negara juga disebut sebagai badan dan organ negara. Tiga organ negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing organ negara melakukan tugasnya sendiri, seperti legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. Legislatif memegang peran penting dalam sistem ketatanegaraan karena berfungsi sebagai wakil rakyat yang membahas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan menyampaikan keinginan masyarakat kepada pemerintah serta bertindak sebagai mediator dalam konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat.

Peran perempuan dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi telah menjadi topik yang semakin mendapat perhatian di berbagai negara lain, termasuk di Indonesia.

Di tengah upaya memperjuangkan kesetaraan gender, perempuan diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang, termasuk di dalam struktur politik, seperti lembaga legislatif. Salah satu bentuk konkret dari partisipasi perempuan dalam dunia politik adalah melalui pemilihan anggota legislatif yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pada periode 2019-2024, DPR RI mencatatkan sejumlah peningkatan peran serta perempuan dalam lembaga legislatif, yang mencerminkan adanya kesadaran lebih besar akan pentingnya inklusivitas dalam pengambilan keputusan politik. Namun, meskipun keberadaan perempuan di DPR RI telah mengalami kemajuan, tantangan masih ada, khususnya terkait dengan bagaimana mereka ditempatkan di dalam komisi-komisi legislatif yang menjadi arena pengambilan kebijakan penting.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan nasional berpotensi untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada tingkat desa, tetapi juga mencakup skala yang lebih luas. Dengan adanya partisipasi perempuan di bidang politik dan pemerintahan, kontribusi mereka dapat memperkuat sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini, perhatian global terhadap kesetaraan gender semakin meningkat, terutama karena posisi perempuan sering kali terdiskriminasi dibandingkan laki-laki di berbagai lapisan masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Diskriminasi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan norma etika, sehingga menghambat partisipasi perempuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menekankan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Namun, perempuan sering kali tidak memiliki akses ke posisi strategis dalam berbagai lembaga. Dalam konteks demokrasi, situasi ini merugikan perempuan karena sistem patriarki sering menempatkan mereka dalam posisi subordinasi. Ketidakpastian yang sama juga dialami oleh anggota parlemen laki-laki terkait peningkatan keterwakilan perempuan.

Setiap individu seharusnya dipandang setara dalam politik, tanpa memandang perbedaan ras, etnis, gender, agama, bahasa, atau identitas lainnya, termasuk disabilitas. Demokrasi seharusnya mendukung perbedaan dan keberagaman serta mengatur perbedaan tanpa adanya kekerasan. Keberadaan demokrasi tidak dapat terwujud jika hak-hak dasar dibatasi secara diskriminatif. Oleh karena itu, penting bagi demokrasi untuk melindungi kelompok masyarakat yang terpinggirkan melalui kebijakan afirmatif yang mendorong kesetaraan dan pemberdayaan. Tidak boleh ada prasangka atau stereotip dalam kebijakan tersebut.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia perlu melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, dalam menetapkan tujuan dan kebijakan negara. Keterlibatan semua masyarakat penting untuk menciptakan representasi yang adil di lembaga legislatif. Keterwakilan perempuan sangat penting karena perempuan merupakan setengah dari populasi, memiliki pengalaman yang berbeda yang perlu diwakili, serta memiliki kepentingan yang terkadang tidak sama dengan laki-laki. Selain itu, keberadaan politisi perempuan dapat menjadi panutan bagi perempuan lain untuk aktif dalam politik.

Di Indonesia, diskriminasi terhadap perempuan telah ada sejak zaman kolonial. Perempuan dianggap sebagai warga kelas dua selama era kolonial, tidak memiliki akses ke kesetaraan gender atau keadilan. Kelompok laki-laki menganggap perempuan sebagai

kelompok yang lemah dan harus melindunginya. Oleh karena itu, stigma muncul ketika laki-laki memegang posisi dominan dalam masyarakat, sementara perempuan ditempatkan dalam kedudukan yang lebih rendah. Adat istiadat ini telah menghalangi perempuan untuk berpartisipasi di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan yang muncul di masyarakat menjadi awal mula terbentuknya system patriarki di Indonesia saat ini.

Dalam praktiknya, keadaan parlemen yang memungkinkan diskriminasi gender sangat memengaruhi tingkat diskriminasi terhadap anggota DPR perempuan. Karena pandangan yang menganggap perempuan sebagai gender jauh dari kekuasaan, perempuan rawan akan dijauhkan dari posisi strategis. Dalam rapat paripurna anggota DPR, pemilihan ketua dan wakil ketua DPR diusulkan untuk dipilih secara musyawarah mufakat. Namun, kandidat perempuan jarang dipilih berdasarkan hasil pemilihan ini. Sejak reformasi pada tahun 2004 sampai 2014, belum pernah ada anggota DPR RI perempuan yang menjabat sebagai ketua DPR.

Perubahan signifikan terjadi ketika Puan Maharani, anggota DPR dari PDI Perjuangan, terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dan kemudian menjadi ketua DPR bersama empat wakil ketua laki-laki lainnya. Kehadiran pimpinan perempuan di parlemen diharapkan menjadi teladan bagi anggota perempuan lainnya, serta membuka akses yang lebih baik untuk perubahan struktural di parlemen yang dapat menciptakan representasi legislatif yang lebih setara gender. Hal ini juga diharapkan dapat memperlancar diskusi legislatif mengenai peran perempuan dalam masyarakat dan meningkatkan urgensi pembahasan undang-undang atau kebijakan yang berkaitan dengan isu gender.

Ada beberapa alasan mengapa keterwakilan perempuan tidak mencapai target 30% . Beberapa di antaranya adalah pandangan buruk terhadap politik, yang dianggap negatif dan identik dengan korupsi, sehingga banyak perempuan enggan untuk terlibat dalam dunia politik. Selain itu, masih banyak anggapan bahwa perempuan yang terjun dalam politik seharusnya lebih fokus pada peran tradisional sebagai ibu rumah tangga dan budaya patriarki yang terus menerus yang menganggap perempuan dinomorduakan dibandingkan dengan laki-laki. Disebabkan pemimpin partai politik yang mayoritas laki-laki biasanya menduduki posisi tertinggi, ada kendala tambahan yang menghalangi penempatan calon legislatif perempuan di posisi penting. Selain itu, perekrutan kader lebih berfokus pada uang dan hubungan dengan penguasa politik daripada kompetensi. Selain itu, penggunaan media yang tidak memadai untuk perempuan dan kontribusi publik yang rendah menyebabkan sedikit pemilih perempuan dalam pemilihan umum.

Perwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, telah menjadi isu sentral dalam kajian politik dan gender di Indonesia. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dianggap penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan perspektif perempuan terakomodasi dalam kebijakan publik. Sejak diberlakukannya sistem kuota 30% untuk perempuan pada tahun 2003, jumlah perempuan anggota DPR RI terus meningkat. Namun, pertanyaan mengenai kualitas representasi perempuan dan seberapa jauh perempuan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik tetap menjadi sorotan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penempatan anggota legislatif perempuan di berbagai komisi DPR RI

periode 2019-2024, dengan fokus pada hubungan antara peran sosial perempuan dan peluang mereka untuk menduduki posisi strategis dalam lembaga legislatif. Dengan mengadopsi pendekatan interseksional, penelitian ini akan mengkaji bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, etnisitas, dan pendidikan berinteraksi dengan gender dalam membentuk pengalaman politik perempuan anggota DPR RI. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat berperan dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berperspektif gender, serta memperkuat pemahaman kita tentang dinamika politik di Indonesia dalam konteks global.

Penelitian ini berfokus pada analisis peran perempuan dalam masyarakat terkait dengan penempatan anggota legislatif perempuan di komisi-komisi DPR RI pada periode 2019-2024. Dengan memfokuskan pada distribusi peran dan pengaruh perempuan dalam struktur komisi, penelitian ini akan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi penempatan tersebut serta dampaknya terhadap kebijakan yang dihasilkan di tingkat nasional. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang seberapa besar kontribusi perempuan dalam menentukan arah kebijakan dan bagaimana dinamika gender mempengaruhi peran mereka di legislatif.

METODE

Metode penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi pengaruh partisipasi perempuan dalam politik terhadap pembangunan nasional di Indonesia dengan pendekatan kualitatif yang sederhana. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan, seperti laporan pemerintah, statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen kebijakan terkait partisipasi perempuan dalam politik. Data yang dikumpulkan akan mencakup jumlah perempuan yang menjabat di posisi strategis pemerintahan, tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, serta indikator pembangunan sosial dan ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya, penelitian akan mengidentifikasi variabel utama yang akan dianalisis, yaitu variabel independen berupa keterwakilan perempuan dalam politik dan variabel dependen yang mencakup indikator pembangunan nasional. Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan teknik statistik deskriptif untuk menggambarkan kondisi keterwakilan perempuan dan indikator pembangunan, serta analisis regresi sederhana untuk menguji hubungan antara kedua variabel tersebut. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk menjelaskan pengaruh keterwakilan perempuan dalam politik terhadap pembangunan nasional, serta menarik kesimpulan mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti juga akan memberikan rekomendasi untuk kebijakan afirmatif yang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendorong partisipasi aktif perempuan di semua tingkat pemerintahan. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan dampak partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional tanpa memerlukan pengumpulan data langsung dari responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender merupakan sifat dan perilaku yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui konstruksi sosial dan budaya. Karena dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya setempat, konsep gender bersifat tidak permanen, berubah sesuai dengan waktu atau bisa disebut tren dan konteks tempatnya. Dapat disimpulkan bahwa gender adalah konstruksi sosial yang tidak berasal dari sifat bawaan lahir sehingga dalam penerapannya di lapangan gender bisa dibentuk atau diubah bergantung pada lokasi, waktu, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum, dan kondisi ekonomi. Hal ini karena gender tidak bersifat kodrat atau permanen seperti jenis kelamin, tetapi merupakan hasil konstruksi manusia yang fleksibel dan dapat berubah.

Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan menyebabkan masalah yang menghambat pembangunan nasional. Peran perempuan sering dianggap “kurang” dibandingkan dengan peran laki-laki yang dominan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini membuat kontribusi perempuan dalam pembangunan nasional masih kurang diakui. Meski begitu, perempuan juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Beberapa isu gender di masyarakat muncul karena adanya anggapan bahwa perempuan masih dianggap sebagai pihak yang lemah, bergantung pada pasangan, dan tidak layak menjadi pemimpin. Stereotip ini dapat ditemukan di tempat kerja, di rumah tangga, dan bahkan di dunia politik, yang mengurangi peran perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, perempuan cenderung berorientasi pada peran yang diharapkan oleh laki-laki, bukan pada kepentingan atau peran perempuan itu sendiri. Padahal, perempuan juga bisa mengoptimalkan potensi mereka untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, misalnya dalam pengelolaan negara seperti peranan perempuan dalam masyarakat terhadap penempatan anggota legislatif. Parlemen merupakan salah satu lembaga bagian dari negara yang bertugas untuk mewakili rakyat atau yang biasa kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Biasanya, DPR berisikan anggota-anggota partai yang menang di dalam pemilihan umum yang biasa diselenggarakan lima tahun sekali. Namun, presentasi laki-laki lebih mendominasi di dalam DPR dibandingkan perempuan.

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yang relatif rendah. Keterwakilan perempuan yang rendah di parlemen Indonesia menyebabkan kebijakan kurang responsif terhadap isu kesetaraan gender dan berbagai masalah yang dihadapi perempuan. Femmy Eka Kartika Putri, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda di Kemenko PMK, menekankan betapa pentingnya partisipasi perempuan di parlemen yang saat ini masih di bawah 30%. Peningkatan keterlibatan perempuan di parlemen dianggap vital untuk pengambilan keputusan politik yang lebih inklusif serta untuk memperkuat demokrasi yang mengedepankan kepentingan perempuan dan anak. Pemerintah saat ini mendorong Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di lembaga legislatif dengan tujuan mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan. Dermawan, Asisten Deputi KG Politik dan Hukum Kementerian PPPA, menjelaskan metode pelaksanaan Grand Design ini, yang mencakup pendidikan politik untuk

mendorong perempuan berperan aktif dalam kepengurusan partai serta sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di legislatif.

Di Indonesia, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hanya mencapai 9%, sementara laki-laki mendominasi dengan 91%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran mengenai kesetaraan gender mulai meningkat, keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia masih belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmasi yang diharapkan bisa mempermudah perempuan untuk terlibat dalam politik nasional. Kebijakan afirmasi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat 1 (UU Pemilu), yang menetapkan bahwa minimal 30% keterwakilan perempuan harus dipenuhi dalam pemilu legislatif selanjutnya. Kebijakan afirmasi tersebut telah berhasil meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Indonesia meskipun peningkatannya belum terlalu signifikan. Pada pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2004-2009 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 11,8% atau setara dengan 61 kursi, sedangkan laki-laki mendominasi dengan 88,9% atau 489 kursi. Selanjutnya, pada periode 2009-2014 keterwakilan perempuan naik menjadi 18,1% dengan total 101 kursi, sementara laki-laki memiliki 82% atau 459 kursi. Namun, pada periode 2014-2019, keterwakilan perempuan mengalami sedikit penurunan menjadi 17,3% atau 97 kursi, sedangkan keterwakilan laki-laki meningkat menjadi 86,3% atau 463 kursi. Untuk periode 2019-2024 keterwakilan anggota DPR RI perempuan kembali meningkat menjadi 20,5% atau 118 kursi. Peningkatan jumlah keterwakilan anggota DPR RI perempuan dari tahun 2004 hingga 2019 mencerminkan dampak dari kebijakan afirmasi kuota 30% yang diinisiasi oleh pemerintah melalui UU Pemilu.

Menurut Rizki Priandi (2019:106) partisipasi perempuan di Indonesia dalam parlemen saat ini masih jauh untuk mencapai target nasional yang sebanding dengan persentase keterwakilan laki-laki. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya peningkatan keterlibatan perempuan dalam pemilu. Diperlukan dorongan agar perempuan lebih berani dan mempunyai kepedulian untuk terlibat secara langsung dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan dapat diperjuangkan ketika mereka menduduki jabatan publik hasil pemilihan umum. Berbagai langkah perlu diambil untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, salah satunya adalah dengan memperkuat kebijakan afirmasi, seperti menetapkan kuota minimum untuk keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif.

Peran perempuan dalam komisi-komisi DPR RI pada dasarnya adalah untuk membawa perspektif gender dalam perdebatan dan keputusan-keputusan politik yang diambil. Dengan meningkatnya jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2019, diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi dalam pembahasan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Perempuan memiliki peran penting dalam berbagai komisi untuk memperjuangkan isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan mereka dan masyarakat luas. Dalam bidang kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, Komisi IX (kesehatan dan tenaga kerja) dan Komisi X (pendidikan dan kebudayaan) sering membahas isu terkait kesehatan

reproduksi, perlindungan ibu dan anak, serta akses layanan kesehatan yang adil. Dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, isu kesetaraan ekonomi seperti peningkatan keterlibatan perempuan dalam dunia usaha, akses pekerjaan yang layak, dan upah setara menjadi fokus di komisi yang membahas ekonomi dan ketenagakerjaan, seperti Komisi IX dan Komisi VII (energi dan sumber daya mineral). Sementara itu, untuk isu kekerasan terhadap perempuan, Komisi III yang membahas hukum dan hak asasi manusia mempunyai peran penting dalam mendorong legislasi yang melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, termasuk pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang menjadi perdebatan di DPR.

Pada periode 2019-2024, meskipun ada upaya untuk memberikan tempat yang lebih besar bagi perempuan, penempatan mereka di komisi-komisi DPR RI masih mengalami ketimpangan. Sebagian besar perempuan ditempatkan di komisi-komisi yang berfokus pada isu-isu sosial dan kesejahteraan, yang dianggap kurang "strategis" dalam pengambilan keputusan politik utama, seperti Komisi VIII (sosial dan agama) dan Komisi IX (kesehatan dan tenaga kerja). Komisi-komisi ini memang penting, namun seringkali kebijakan yang dibahas di komisi-komisi ini lebih bersifat implementatif daripada yang lebih mempengaruhi kebijakan tingkat negara, seperti yang ada di Komisi I (pertahanan dan luar negeri) atau Komisi III (hukum).

Ketimpangan ini tidak hanya terkait dengan pembagian posisi di dalam komisi, tetapi juga dengan pengaruh yang dimiliki anggota legislatif perempuan di dalamnya. Misalnya, perempuan lebih sering ditempatkan dalam komisi-komisi yang membahas isu kesejahteraan sosial dan pendidikan, sementara komisi-komisi yang menangani kebijakan ekonomi, pertahanan, dan hukum, yang memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan negara, cenderung didominasi oleh laki-laki.

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, keterlibatan perempuan di dalam komisi-komisi DPR RI memiliki potensi besar untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Kehadiran perempuan dalam komisi yang membahas kesehatan, pendidikan, sosial, dan keluarga dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih berpihak pada perempuan dan anak, terutama dalam hal akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan. Selain itu, perempuan di komisi yang menangani kebijakan ekonomi, hukum, dan sosial berperan penting dalam mendorong integrasi perspektif gender ke dalam kebijakan yang lebih luas, sehingga membantu mengurangi ketimpangan gender di berbagai sektor kehidupan. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki kesempatan untuk mengadvokasi kesetaraan gender melalui perbaikan legislasi, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan Undang-Undang Kesetaraan Upah.

Upaya untuk menaikkan angka representasi perempuan di DPR RI adalah hal yang penting untuk didorong lebih maju agar mencapai kesetaraan gender dalam dunia politik. Sudah banyak upaya yang telah diajukan untuk masalah ini, beberapa darinya adalah hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Peningkatan literasi dan advokasi yang tidak mengarah ke diskriminasi antar gender juga sangat diperlukan sebagai langkah krusial untuk menambah angka partisipasi perempuan di dalam dunia politik, membangun solidaritas dan berkolaborasi dalam mendukung angka jumlah perempuan di dalam parlemen di tahun 2024.

Demi mendorong keterlibatan perempuan dalam parlemen, terdapat beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan di dalam dunia politik, salah satunya adalah dengan melakukan advokasi mengenai kesetaraan kedudukan dan gender agar masyarakat sadar bahwa perempuan juga dapat ikut berpartisipasi dan turut andil dalam politik. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara memperbanyak minat literasi politik untuk memberikan pandangan dan pengetahuan terhadap masyarakat luas tentang pentingnya peranan perempuan di dalam dunia politik, khususnya di DPR RI. Hal ini dapat membantu untuk mengatasi dan mematahkan stereotip terhadap gender di masyarakat yang sering menjadi salah satu penghalang utama bagi perempuan ketika ingin ikut berpartisipasi dalam dunia politik.

Melakukan konsolidasi dengan internal partai dan berkolaborasi dengan partai external untuk meningkatkan juga dapat menjadi salah satu langkah awal untuk menguatkan dukungan serta solidaritas antar gerakan pengikat kapasitas politik perempuan. Langkah ini dapat menghilangkan pembatas-pembatas antar partai politik dan mempererat hubungan antar partai. Dan dengan memperbaiki regulasi untuk menyediakan ruang bagi perempuan untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, dapat membuat nuansa aman bagi perempuan dan merasa diikutsertakan dalam kegiatan, bukan hanya sebatas pelengkap atau pemenuhan syarat tertulis saja. Dengan menerapkan beberapa upaya tersebut, diharapkan dapat membantu meningkatkan angka partisipasi perempuan di dalam parlemen kedepannya. Tidak hanya angka dan statistik yang ditingkatkan, namun kualitas dan keterlibatan mereka dalam membangun demokrasi dengan masyarakat juga harus ditingkatkan.

KESIMPULAN

Gender adalah konstruksi sosial yang fleksibel dan dapat berubah sesuai budaya, waktu, dan kondisi sosial. Namun, stereotip gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak lemah membatasi peran mereka, terutama dalam politik. Di Indonesia, keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah, meskipun kebijakan afirmasi seperti kuota 30% telah meningkatkan partisipasi perempuan secara bertahap. Pemerintah terus mendorong pendidikan politik dan strategi peningkatan keterwakilan perempuan untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu gender.

Partisipasi perempuan di parlemen Indonesia masih rendah dibanding laki-laki, meskipun kebijakan afirmasi seperti kuota 30% telah diterapkan. Perempuan memiliki peran penting dalam memperjuangkan isu kesehatan, ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Namun, penempatan mereka di komisi strategis masih terbatas, sehingga mengurangi pengaruhnya dalam kebijakan nasional. Meski menghadapi tantangan, perempuan di parlemen berpotensi menghasilkan kebijakan inklusif yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak kelompok marginal.

Peningkatan representasi perempuan di DPR RI merupakan langkah penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik. Upaya yang dapat dilakukan mencakup advokasi kesetaraan gender, peningkatan literasi politik, dan konsolidasi antar partai untuk memperkuat dukungan bagi perempuan. Langkah-langkah ini bertujuan mematahkan stereotip gender yang menghambat partisipasi perempuan serta memperbaiki regulasi agar perempuan merasa didukung dan diikutsertakan secara nyata, bukan hanya sebagai

pelengkap. Selain meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, kualitas dan kontribusi mereka dalam membangun demokrasi juga perlu mendapat perhatian lebih.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyani, V. N. (2022). Pemerintahan dan Gender: Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. . *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.*, 184-193.
- Jayani, P. H. (2024). Representasi Gender Di Parlemen Pasca Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang Menuju Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Politik. . *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 37-45.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. . *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 1-13.
- Kurniawati, E. &. (2021). Subordinasi Perempuan: Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. . *Al Huwiyah: Journal of Woman and Children Studies*.
- Mardlatillah, S. D. (2022). Perempuan Dan Politik: Peran Perempuan Dalam Dunia Politik Periode 2009-2019. . *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak.*, 161-167.
- Milana, R. &. (2021). Milana, R. & Muksin, N. N. (2021). Kampanye Politik Calon Legislatif Perempuan (Studi Fenomenologi pada Pemilihan Umum 2019). . *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 158-168.
- Novrizaldi. (2021). Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia Penting Bagi Kemajuan Bangsa. *Jakarta Pusat:KEMENKO PMK*.
- Nursyifa, P. T. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. . *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*.
- Pratiwi, F. P. (2020). Hegemoni Partai Politik Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024.
- Priandi, R. &. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 106-116.
- Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap Penempatan Perempuan Anggota Legislatif pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 162-181.
- Sari, L. G. (2022). Analisis Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Politik Berwawasan Gender: Studi Dokumentasi Tentang Gender Di Indonesia. . *Syntax*.
- Tedjo, P. (2022). Peran Perempuan Dalam Pembangunan Politik. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*.
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang. *Kajian*, 19-34.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. . *JISIPOLJurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*, 126-142.